

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi lingkungan semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keberlanjutan. Namun, implementasi akuntansi lingkungan di berbagai perusahaan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang mendasari sumber daya perusahaan. Perusahaan mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran karena kurangnya tenaga kerja yang memadai guna menjalankan sistem akuntansi lingkungan secara efektif. Hal ini mengakibatkan pencatatan biaya yang berdampak pada lingkungan sering kali diabaikan atau tidak dilakukan secara optimal (Aditia et al., 2023). Selain itu, kurangnya dukungan teknologi juga menjadi penghambat dalam penerapan akuntansi lingkungan. Sistem informasi akuntansi yang tersedia di sebagian besar perusahaan umumnya masih berorientasi pada pelaporan keuangan tradisional, sehingga belum mampu mengintegrasikan data terkait dampak lingkungan. Perusahaan yang ingin beradaptasi dengan praktik akuntansi lingkungan sering kali dihadapkan pada biaya investasi teknologi yang tinggi, yang tidak semua perusahaan mampu tanggung (Studi et al., 2024).

Ketidakpastian *trend* riset akuntansi lingkungan turut memperumit situasi. Riset di bidang ini masih terus dikembangkan dan belum mencapai kesepakatan universal mengenai metode pencatatan dan pengukuran biaya lingkungan yang standar. Akibatnya, perusahaan kerap merasa ragu untuk mengadopsi sistem akuntansi lingkungan karena khawatir pendekatan yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik global di masa mendatang (Safitri & Sari, 2022).

Melihat berbagai kendala tersebut, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong penerapan akuntansi lingkungan. Pemerintah perlu menekankan pentingnya pembebanan biaya kepada lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Konsep ini kemudian dikenal sebagai akuntansi lingkungan, di mana perusahaan

diwajibkan mencatat dan mengungkapkan biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan lingkungan, pencegahan pencemaran, serta pemulihan kerusakan ekosistem. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah, diharapkan perusahaan akan lebih terdorong untuk menerapkan akuntansi lingkungan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Studi et al., 2024).

Akuntansi lingkungan mulai mendapat perhatian sejak terjadinya krisis energi pada tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an, setelah krisis berakhir dan kondisi ekonomi mulai stabil, perhatian terhadap akuntansi lingkungan sempat mengalami penurunan karena belum adanya standar yang jelas dalam mengukur dampak ekonomi dari aktivitas lingkungan. Namun, memasuki tahun 1990-an, kesadaran terhadap perlindungan lingkungan kembali meningkat, sehingga mendorong akuntansi lingkungan menjadi perhatian konsumen dan dunia usaha. Secara bertahap, berbagai standar dan pedoman mulai dikembangkan oleh organisasi akuntansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan dampak lingkungan (Universitas Pembangunan Jaya, 2020).

Pada konteks sektor publik, penerapan akuntansi lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi dan standar pelaporan yang berlaku. Di Indonesia, penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP berfungsi sebagai pedoman normatif bagi entitas sektor publik dalam mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan secara akuntabel dan transparan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan keberlanjutan, pelaporan keuangan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial dan lingkungan. Kerangka pelaporan keberlanjutan yang banyak digunakan secara internasional adalah *Global Reporting Initiative* (GRI), yang disusun berdasarkan konsep *triple bottom line* atau 3P (*People, Planet, dan Profit*). Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan suatu organisasi tidak hanya diukur dari kinerja keuangan (*profit*), tetapi juga dari tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat (*people*) serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam konteks akuntansi lingkungan, dimensi *planet* menjadi fokus utama, yang tercermin dalam penggunaan GRI 300 tentang lingkungan yang didalamnya terdapat GRI 306 tentang limbah sebagai pedoman pengungkapan dampak lingkungan secara sistematis dan transparan.

Rumah Sakit (RS) merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan medis secara lengkap, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan layanan gawat darurat. RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo ini didirikan pada tahun 1952, berdasarkan SK Bupati Situbondo No.188/623/P/004.2/2009 rumah sakit ini telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Pada kegiatan operasionalnya, RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo berpotensi menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah infeksius, non-infeksius, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Apabila rumah sakit tidak mengelola limbah dengan baik maka akan mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pengolahan limbah yang kurang sempurna, juga kemungkinan besar limbah yang dihasilkan dikhawatirkan dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang menular (Rahayu, 2019).

Jika jumlah limbah yang dihasilkan melampaui kapasitas lingkungan untuk mengelolanya, maka keseimbangan lingkungan dapat terganggu (goleman, daniel, et.al, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan limbah menjadi hal yang penting untuk dilakukan, salah satunya yaitu limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit. Regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan limbah adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mewajibkan rumah sakit untuk mengelola lingkungan dengan baik. Aturan ini memiliki kaitan erat dengan akuntansi lingkungan. Karena rumah sakit perlu mencatat, menghitung, dan

melaporkan biaya serta tanggung jawab yang muncul akibat kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti terkait penerapan akuntansi lingkungan pada rumah sakit, dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdoer Rahem Situbondo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdoer Rahem Situbondo?
2. Apakah penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo telah sesuai dengan standar PSAP dan GRI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa mengenai penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdoer Rahem Situbondo.
2. Untuk menganalisa apakah penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Abdoer Rahem telah sesuai dengan standar PSAP dan GRI?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan manfaat yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan peneliti dalam menganalisis dan menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen rumah sakit mengenai biaya lingkungan yang terkait dengan pengolahan limbah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi lingkungan khususnya pada rumah sakit